BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fase Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertia Fase

Semua pembangunan menyangkut bahkan ditunjukan untuk msyarakat, pembangunan masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri. Pemebangunan masyarakat tidakhanya bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan tersendiri yang disebut Community power.

Pembangunan yang ada dimasyarakat dalam kenyataan terdapat fase – fase atau tahapan-tahapan dalam pembangunan yang ada di masyarakat. Pengertian fase menurut Ndraha dapat diartikan sebagai ”penahapan atau pembabakan tentang perjalanan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau proses pertumbuhan tertentu” (Ndraha, 1987:41).

Menurut pendapat diatas fase merupakan penahapan terhadap individu setiap kelompok masyarakat, sehingga dalam perjalanan setian individu diwarnai dengan ciri-ciri khususu dalam pertumbuhan dari setiap kelompok masyarakat.

2.1.2 Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal. Partisipasi terbentuk apabila adanya keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan atau program yang diberikan oleh pemerintah, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat program dan rencana yang di berikan oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan harapan pemerintah. Menurut Subakti bahwa:

> "Partisipasi adalah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik"
> (Surbakti, 1992:140).

Menurut pendapat diatas partisipasi akan berjalan apabila masyarakat ikut serta dalam keputusan politik yang diadakan oleh pemerintah karena program yang diadakan oleh pemerintah tampa lain bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pengertian partisipasi yang lain menurut Inu Kencana Syafiie adalah;

> "Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama."
> (Syafiie, 2001:142)

Menurut pendapat diatas partisipasi dapat menentukan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam setiap organisasi, sehingga dapat mendorong

individu untuk berperan serta dalam partisipasi sehingga tujuan organisasi setiap tujuan dapat terlaksana.

Partisipasi akan berjalan apabila adanya kemauwan dari setiap individu dan organisasi untuk ikut berperan serta dalam partisipasi. Partisipasi menurut Diana Conyers adalah :

> "Partisipasi masyarakat adalah alat yang berguna untuk memperoleh informasi (fakta) mengenai keadaan atau kondisi, sikap, harapan, dan kebutuhan masyarakat karena tanpa kehadiran masyarakat maka program pengembangan pembangunan akan gagal"
> (Conyers, 1991 : 154-155).

Setiap partisipasi masyarakat akan mendapatkan informasi, keadaan, atau kondisi, sikap, harapan dan kebutuhan masyarakat yang disampaikai dalam setiap program dalam pembangunan tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka suatu program tidak akan berjalan dengan baik.

Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian membagi partisipasi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi tidak aktif, yaitu;

> "Partisipasi itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Partisipasi pasif dapat berupa sikap, perilaku, tindakan, rakyat tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran pembangunan nasional.

Urayan diatas bahwa partisipasi terdapat dua jenis diantaranya partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi pasif dapat berupa perilaku masyarakat yang tidak ikut berperan aktif dalam setiap pembangunan yang ada di masyarakat. Partisipasi aktif dapat terlaksananya pembangunan sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan partisipasi aktif dapat terwujud apabila:

1. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga – lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasi.

2. Mewujudkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib sendiri kepada orang lain, seperti kepada pimpinan, tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal.
3. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab.
4. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Kerelaan merupakan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan lebih penting."
   (Siagian, 1985:2)

Partisipasi aktif merupakan suatu tindakan yang nyata untuk turut serta dalam memenuhi ketaatan dan kerelaan pada kepentingan bersama. Yang dapat berbentuk pengorbanan materi atau tenaga sebagai bentuk rasa tanggungjawab kepada kepentingan yang jauh lebih luas dan lebih penting.

Pengertian partisipasi yang dijelaskan oleh Britha Mikkelsen yang mengutip pengertian Fao, adalah:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan kebijakan.
2. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang di tentukan sendiri.
3. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.
4. Partisipasi adalah suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa organisasi atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasanya untuk kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasanya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antar masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial.
   (Mikkelsen, 2001:4)

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat terhadap suatu kegiatan secara sukarela. Partisipasi sebagai bentuk komunikasi antar masyarakat maupun masyarakat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring suatu kegiatan agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal

dan dampak sosial. Soemarno A.P dan Tatie S Ismet mengungkapkan pendapatnya bahwa

> "Partisipasi tumbuh karena adanya dorongan dari diri manusia yang muncul karena kesadaran, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar, karena partisipasi bersifat semu dan mudah berubah atau lenyap"
> (Sumarno dan Ismet, 1999:140).

Partisipasi muncul karena kesadaran masyarakat tanpa adanya paksaan dari luar. Partisipasi bersifat mudah berubah bahkan cenderung mudah lenyap. Partisipasi timbul karena adanya proses sosialisasi dan dorongan dari diri masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat menurut Bintarto Tjokroamidjoyo sebagaimana dikutip oleh Taliziduhu Ndraha sebagai berikut:

> "Keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan"
> (Ndraha, 1990:14).

Hal senada dikemukakan oleh Maskun bahwa partisipasi dapat dilihat secara *Bottom up* yaitu gerakan peran serta yang berasal dari bawah, timbul dan dirasakan oleh masyarakat sendiri dan *Top down* yaitu gerakan peran serta yang direncanakan secara stimultan sebagai kebijakan yang terpusat yang datang dari pemerintah kepada masyarakat sesuai orientasi, karakteristik, dan kondisi daerah". Selanjutnya Gordon W. Alport seperti yang dikutip oleh Santoso Sastropoetro menjelaskan arti kata partisipasi secara lebih singkat sebagai. "*the person who participace is ego involved instead of merely task invilved*"

(Sastropoetro, 1988:12).

Maksud dari peryataan tersebut adalah bahwa seseorang melakukan partisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya atau egonya yang sifatnya lebih luas dari keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Keterlibatan dirinya, berarti adanya keterlibatan, pikiran, perasaan. Secara lebih jelas maka apabila seseorang berpartisipasi pada satu hal atau kegiatan, seseorang tersebut berpartisipasi karena menurut pikiran dan pertimbangan memang perlu melakukan kegiatan tersebut dan perasaannya pun berkesan untuk melakukan.

Maka dari sejumlah pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran yang disertai dengan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam partisipasi tersebut memiliki sejumlah unsur penting yang menentukan seperti yang dinyatakan oleh Santoso Sastropoetro sebagai berikut:

1. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.
2. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.
3. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain.
4. Adanya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan bersama (Sastropoetro, 1998:41).

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan selain agar masyrakat dapat merasakan manfaatnya masyarakat juga dapat mengetahui itikad baik pemerintah. Masyarakat sadar akan pembangunan melalui partisipasi karena suatu pembangunan dari rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban masyarakat oleh karena itu pemerintah berkewajiban melindungi kepentinggan masyarakat tersebut melalui produk-produk hukum berupa peraturan perundang-udangan yang jelas tentang

pembangunan melalui partisipasi masyarakat, dan sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat mereka harus berperan aktif demi terlaksananya pembangunnan.

Masyarakat yang tingkat keberdayaannya masih rendah dianggap berdaya apabila ia mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningktan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi.

Edi Suharto sangat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat karena menurutnya:

> "Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri karena tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan mereka sendiri. Tingkat kesadaraan masyarakat merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapatmemobilisasi tindakan bagi perubahan pemberdayaan juga melibatkan akses tehadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif"
> (Suharto 2004:8).

Keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan selama ini hanya dilihat dalam konteks yang sempit bahkan hanya dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Kondisi seperti ini mengakibatkaan peran serta masyarakat terbatas hanya pada implementasi atau penerapan program saja; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari mereka harus menerima keputusan yang sudah ditentukan pihak luar baik itu pemerintah ataupun lembaga bukan.

2.1.3 Pengertian Masyarakat

Bahasa inggris masyarakat disebut *Society*, asal kata *society* yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *Syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk aturan-aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melaikan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan (Munandar, 1986:63).

Soelaeman juga mengemukakan bahwa "Masyarakat merupakan suatu lingkungan yang bersifat makro". Aspek teritorium kurang ditekankan, namun aspek keteraturan sosial dan wawasan hidup kolektif memperoleh bobot yang lebih besar. Sifat makro diperoleh dari kenyataan, bahwa masyarakat pada hakekatnya terdiri dari sekian banyak komunitas yang berbeda, sekaligus mencakup berbagai macam keluarga, lembaga dan individu-individu"
(Soelaeman, 1986:67-68).

Etzioni melihat masyarakat sebagai sekumpulan sub-sub kolektiva atau sub-sub kelompok yang longgar. Etzioni menyatakan bahwa negara dan yang lebih umum, proses politik nasional jauh lebih banyakberhubungan dengan organisasi-organisasi yang merupakan sub-sub kolektif, dan dengan kombinasi-kombinasi kolektif ketimbang dengan organisasi yang tidak memiliki dasar kolektif. Dengan demikian dalam masyarakat post-modern, masyarakat bukan bertanggungjawab kepada individu, tetapi lebih bertanggung jawab kepada kolektiva atau kelompok yang bertindak secara bersama-sama (Etzioni, 1999:366).

Menurut Munandar Soelaeman, untuk arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial. Kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran rakyat, dan sebagainya. Individu berada dibawah pengaruh suatu kesatuan sosial. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status dan peranan sosial (Soelaeman, 1989:63-64). Pendapat-pendapat tersebut mengenai masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan yang memiliki potensi untuk dapat berperan dalam kehidupan sosialnya.

2.1.4 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat menurut WHO seperti yang dikutip oleh Sastropoetro dalam bukunya *Partisipasi, Komunikasi, Persepsi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional adalah*: "Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya saja" (Sastropoetro, 1998:18).

Partisipasi berdasarkan pendapat diatas Keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan masyarakat dengan hanya melihat dari segi lahiriahnya saja tanpa memperhitungkan bagaimana batiniah atau perasaannya. Para perumus kebijakan tidak memperdulikan apakah masyarakat melakukan partisipasi dengan rela atau karena terpaksa. Akan tetapi agar partisipasi dapat tercipta maka harus ada kerjasama antara perumus kebijakan yaitu pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan karena itu mutlak diperlukan peran aktif masyarakat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Tjokroamidjojo, yang berpendapat bahwa:

> "Berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya, tidak saja dari pengambilan kebijakan tinggi, para perencana, aparatur pelaksana operasional, tetapi juga dari petani-petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, para pengusaha dan lain-lain"
> (Tjokroamidjojo, 1995:206).

Suatu rancangan pembangunan akan tercapai apabila adanya keterlibatan aktif masyarakat banyak yang biasa disebut partisipasi. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk penyusunan, penentuan dan pengambilan kebijakan.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo seperti yang dikutip oleh Ndraha mengatakan bahwa partisipasi adalah:

> "Partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan Masyarakat dalam penentuan arah, strategi, dan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan"
> (Ndraha, 1990:14).

Pendapat tersebut dinyatakan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat juga dilihat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat dari pembangunan. Partisipasi masyarakat tersebut tidak terlihat tanpa dikembangkan dan ditumbuhkan terlebih dahulu.

Adapun menurut FAO seperti dikutip oleh Britha Mikkensen dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, definisi partisipasi* yaitu sebagai berikut

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pehak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses aktif yang mengandung arti bahwa organisasi ataukelempok yang terkait mengambik inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal ini. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitiring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
4. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendirinya.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka”
   (Mikkelsen, 2001:46).

Hal tersebut seperti dinyatakan oleh maskun dalam bukunya pembangunan masyarakat desa, asa, kebijakan dan manajemen bahwa: “Partisipasi masyarakat dapat tercipta apabila dikehidupan sifat saling percaya antara perangkat pemerintah dengan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat” (Maskun, 1993:24) .

Dalam bukunya tersebut juga maskun menyatakan bahwa partisipasi masyarakat ditentukan oleh:

1. “Kebutuhan masyarakat
2. Kepentingan masyarakat
3. Adat istiadat
4. Sifat-sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain”
   (Maskun, 1993:24).

Seperti pendapat dari Taliziduhu Ndraha dalam bukunya *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* yang menyatakan bahwa:

> “Di negara berkembang umumnya partisipasi masyarakattidak segera kelihatan. Partisipasi masyarakat harus digerakan dan dibentuk. Dalam hubungan ini partisipasi masyarakat berfungsi sebagai kekuatan proses pembangunan. Adapun yang memegang peranan dalam membangkitkan dan membentuk partisipasi masyarakat adalah pemerintah”
> (Ndraha, 1990:110).

Adapun syarat-syarat supaya partisipasi masyarakat dapat berhasil seperti yang dikemukakan oleh goldsmith dan Blustain yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha dalam bukunya Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Yaitu:

1. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Adanya motivasi dari pimpinan masyarakat
3. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.
   (Ndraha, 1990:150).

Partisipasi masyarakat yang aktif tersebut memiliki unsur-unsur yang penting sehingga pelaksanaannya efektif, seperti dinyatakan oleh Santoso Sastropoetro dalam bukunya *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Yaitu:

> “Unsur-unsur penting dan turutmenetukan dalam partisipasi adalah:
> 1. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.
> 2. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.
> 3. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk sendiri tampa dipaksa orang lain.
> 4. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama” (Sastropoetro, 1988:41).

2.1.5 Fase Partisipasi Masyarakat

Santoso Sastropoetro dalam bukunya *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disipslin dam Pembangunan Nasional*, menyatakan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

> 1. "Tingkat saling mengerti. Tujuan adalah untuk membantu para anggota kelompok yaitu memahami masing-masing fungsi dan sikap, sehingga dapat mengembangkan kerja sama yang lebih baik.
> 2. Tingkat penasehatan atau sugesti yang dinbangun atas dasar saling mengerti, kerena para anggota kelompok pada hakekatnya sudah cenderung siap untuk memberikan suatu usul atau saran kalau telah memahami masalah adan ataupun situasi yang dihadapi kepada mereka.
> 3. Tingkat otoritas. Otoritas pada dasarnya memberikan kepada kelompok suatu wewenang untuk memantapkan keputusannya. Wewnang demikian dapat bersipat resmi kalau kelompok hanya memberikan kepada pimpinan konsep keputusan yang kemudian dapat diresmikan keputusan pemimpin".
>
> (Sastropotro, 1988:47)

Dalam bukunya Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Riwu Kaho menyatakan tahap-tahap dari partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam 4 (empat) jenjang, yaitu: *"Participation in decision making, participation in implementation, participation in benefits, participation in evaluation."* (Kaho, 2002:115). Partisipasi dalam pembuatan suatu keputusan sangat diperlukan dikarenakan menyangkut nasib masyarakat sendiri.

Mubyarto menyatakan hal yang sama seperti dikutip oleh Riwu Kaho dalam bukunya yang berjudul *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*: "dalam keadaan yang paling ideal diikutsertakan masyarakat untuk membuat 'putusan polotik' yang menyangkut nasib mereka, adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat."(Kaho, 2002:115).

Tahap partisipasi kedua yaitu partisipasi dalam pelaksanaan. Menurut pendapat Uphoff, yang dikutip oleh Riwu Kaho dalam bukunya yang berjudul *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, yaitu "Partisipasi dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berguna bagi pelaksana pembangunan."(Kaho, 2002:115-116).

Tahapan partisipasi ketiga yaitu partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Hasil dari setiap kegiatan hendaknya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebutseiring dengan pendapat Riwu dalam buku Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

> "Anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Demikian pula hanya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, rakyat atau masyarakat daerah harus dapat menikmati hasilnya secara adil.
> (Kaho, 2002:116).

Tahapan yang terakhir dari partisipasi dalam evaluasi. Setiap penyelenggara kehidupan bersama, dapat dinilai berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Riwu Kaho dalam bukunya Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

> "Sudah sepantasnya masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat dapat dijadikan sebagai hakim yang adil dan jujur dalam menilai hasil yang ada."
> (Kaho, 2002:115).

Pendapat diatas dapat diuraikan apabila masyarakat diberikan kesmpatan untuk memberi penilaiyan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat dapat dijadikan hakim untuk menilai hasil dari kinerja aparatur pemerintahan di daerah.

Adapun tahapan-tahapan partisipasi menurut Talijiduhu Ndraha dalam bukunya *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* Yaitu:

1. Partisipasi dalam atau melalui kontaknya dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam mempersiapkan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan,) menginginkan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan kegiatan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rancana) termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka dan partisipasi dalam hal yang bersifat ternis (desain proyek).
4. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil kegiatan.
6. Partisipasi dalam menilai kegiatan."
   (Ndraha, 1990:103-104).

Taliziduhu Ndraha Berpendapat dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Terdapat beberapa tahapan atau Fase dalam partisipasi masyarakat diantaranya:

1. Fase informasi
2. Fase perencanaan
3. Fase penentuan anggaran
4. Fase hasil
5. Fase evaluasi
   (Ndraha, 1990:109).

Informasi adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan oleh masyarakat setelah informasi pelelangan barang dan jasa telah diterima. Informasi dapat

dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut frekuensi penerimaan informasi tentang program pelelangan barang dan jasa yang akan dilaksanakan, tanggapan atau respon yang diberikan setelah menerima informasi pelelangan barang dan jasa, mencari keterangan mengenai kegiatan yang akan dilaksanak dalam pelelangan barang dan jasa dan mengajak rekanan yang lain untuk terlibat dalam pelelangan barang dan jasa.

Perencanaan adalah keterlibatan masyarakat secara aktif ketika sebuah program pelelangan barang dan jasa mulai direncanakan. Keterlibatan dilihat dengan menggunakan indikator frekuensi kehadiran dalam setiap pertemuan dalam pelelangan barang dan jasa, keterlibatan dalam memberikan saran mengenai pelelangan barang dan jasa, dan keterlibatan dalam penentuan anggaran pelelangan barang dan jasa.

Penentuan anggaran adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan oleh masyarakat dalam memberikan kontribusinya ketika kegiatan pelelangan barang dan jasa di laksanakan. Penentuan anggaran diukur dengan indikator memberikan kontribusi atau sumbangan dengan bentuk pemikiran dalam pelelangan barang dan jasa, memberikan kontribusi atau sumbangan dengan bentuk tenaga dalam pelelangan barang dan jasa, memberikan kontribusi atau sumbangan dalam bentuk uang dalam pelelangan barang dan jasa dan memberikan kontribusi atau sumbangan dalam bentuk barang dalam pelelangan barang dan jasa.

Hasil adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan masyarakat terhadap hasil – hasil pelelangan barang dan jasa yang dicapai. Hasil dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut manfaatkan hasil pelelangan barang dan

jasa, memelihara hasil pelelangan barang dan jasa dan mengembangkan hasil pelelangan barang dan jasa.

Evaluasi adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan oleh masyarakat dalam penilaian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pelelangan barang dan jasa, serta seberapa jauh hasil pelelangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Evaluasi dapat dilihat dari memberikan penilaian terhadap hasil pelelangan barang dan jasa serta pengambilan keputusan setelah penilaian dari hasil pelelangan barang dan jasa.

2.1.6 Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terdapat dalam beberapa macam, seperti terdapat dari Santoso Sastropoetro dalam bukunya *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, yaitu:

1. "Komunikasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang atau barang.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu atau intansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga).
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruh oleh komunitas.
5. Sumbangan dalam bentuk kerja yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli.
6. Aksi masa.
7. Mengadakan pembangunan.
8. Membangun proyek komunitas yang bersifat otonom."
   (Sastropoetro, 1988:16).

Macam-macam dari partisipasi masyarakat dapat terlaksanan apabila dari kedelapan macam tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Senada

dengan pendapat Ndraha tersebut, Yadov membagi jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

1. "*Participation in decesion making* (Partisipasi dalam pengambilan keputusan).
2. *Participation in implementation of development programmer and projects* (partisipasi dalam pelaksanaan program dan pembangunan).
3. *Participation in shiring the benefits of development programmers and projects* (partisipasi dalam berbagai manfaat pembangunan).
4. *Participation in monitoring and evalustion of development programmers and projects* (partisispasi dalam bentuk pengawasan adan evaluasi program serta proyek)."
   (Yadov, 1980:87).

Menurut Ndraha, partisipasi masyarakat dengan melibatkan fisik, mental dan emosional tersebut, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
2. Partisifasi dalam memberikan tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menilai pembangunan.
   (Ndraha, 1999:125-126).

Adapun jenis-jenis partisipasi menurut Santoso Satropoetro dalam dalam bukunya yang berjudul Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional yaitu pikiran dan tenaga, keahlian, barang, dan uang. (Satropoetro, 1988:16).

2.2 Lelang

2.2.1 Pengertian lelang

Lelang selama ini telah dikenal luas oleh segala lapisan masyarakat baik itu dari golongan masyarakat kelas bawah sampai golongan masyarakat kelas atas. Namun apabila kita berbicara tentang lelang yang dilaksanakan oleh Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, mungkin hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mengetahuinya.

Hal ini jika tidak kita sikapi dengan sungguh-sungguh maka nantinya akan mengkerdilkan atau menghilangkan peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai suatu lembaga Pemerintah yang bertujuan untuk mengurusi dan menyelesaikan Piutang Negara baik itu melalui penjualan secara lelang maupun penyelesaian diluar lelang. Memahami dan mengkaji lebih jauh permasalahan mengenai peran lelang dapat ditinjau dari pengertian lelang secara umum dan secara khusus.

Pengertian lelang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 sub 17 adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

2.2.2 Syarat – Syarat Lelang

Pelelangan yang dilaksana oleh pemerintah atau oleh siapapun, pelelangan memiliki prasyarat yang harus dilaksanankan dan menjadi syarat dalam pelelangan diantaranya:

1. Lelang dilakukan di muka umum
2. Lelang dilakukan berdasarkan hukum
3. Lelang dilakukan di hadapan Pejabat
4. Lelang dilakukan dengan penawaran harta
5. Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat
6. Lelang ditutup dengan Berita Acara

Menurut pendapat diatas lelang dilaksanakan apabila pesertanya lebih dari dua orang atau lebih, dilakukan dimuka umum agar tidak terjadi tindakan korupsi

diantara panitia lelang dengan peserta lelang setelah terkumpul peserta lelang maka pelaksanaan lelang tersebut harus memiliki badan hukum yang sah, apabila telah terpenuhi semua dilaksanakan pengumpulan peminat sehingga proses lelang dapat dilaksanakan dan menentukan pemenang lelang.

2.3 *Interconnected Network* (*Internet*)

2.3.1 *Pengertian Internet*

Perkembangan teknologi informasi dan komputer telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk memperoleh informasi. Informasi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, karena dengan informasi manusia dapat memiliki wawasan yang luas. Manusia dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, salah satunya melalui *internet*. Pengertian *internet* menurut Jugiyanto Hartono, yaitu:

> "Merupakan jaringan *(network)* komputer yang terdiri dari ribuan jaringan komputer *independen* yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Jaringan komputer ini dapat terdiri dari lembaga pendidikan, pemerintahan, militer, organisasi bisnis dan organisasi-organisasi lainnya" (Hartono, 1988:341-342).

Setiap komputer yang terhubung dengan jasa layanan *internet* memiliki alamat *internet*. Pengguna *internet* dapat saling bertukar informasi melalui surat elektronik (*e-mail*) dan berinteraksi dengan jaringan-jaringan lainnya di *internet* lewat alamat *internet*. Informasi yang diperoleh dari *internet* akan lebih lengkap, karena jaringan *internet* merupakan jaringan komputer yang terbesar di dunia.

Internet merupakan salah satu produk teknologi terbaru dan cukup mutakhir dan banyak manfaat yang bisa diambil dari keberadaan internet ini.

Penguna internet saat ini bisa dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkannya dengan mengunjungi salah satu atau beberapa situs yang tersedia.

> "Situs merupakan sebuah lokasi di internet yang memiliki akses ke semua pengguna internet dan dapat saling bertukar dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain dalam suatu jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi seperti kabel telepon"
> (Febrian, 2001:180).

Berdasarkan pengertian di atas situs merupakan bagian visual dari internet yang saling berhubungan satu sama lain. Situs berkembang sangat pesat dan salah satu alasan utamanya adalah kemudahan pemakainya. Bentuk situs seperti halaman-halaman majalah yang dilengkapi dengan gambar, teks dan foto. Situs mempermudah akses ke *database* dan arsip yang dapat menampilkan informasi, file suara digital, karya seni dan bahkan klip film. Dalam membangun situs yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Akses, situs *web* harus bisa diakses sebagai syarat utama situs *web* yang baik. Bagaimanapun indahnya tampilan dari situs *web* tidaklah berarti jika orang lain tidak bisa mengaksesnya.Artinya akses itu sangat penting, sehingga faktor cuaca dan wilayah menentukan apakah situs itu dapat dibuka atau tidak.
2. Komposisi, tidak dapat dipungkiri bahwa tampilan yang indah dan menarik tentunya mempengaruhi orang lain untuk membuka situs *web* tersebut berulangkali. Sehingga pembuat situs *web* itu harus kreatif dan mengembangkan imajinasi serta ide agar tampilan situs *web* selalu menarik.
3. *Content*, isi dari situs *web* turut andil dalam menjaring pengunjung. Isinya harus variatif, dapat memenuhi kebutuhan informasi dan didukung oleh gambar serta ilustrasi yang pas.
4. Interaksi, sebuah situs *web* yang baik adalah terciptanya komunitas. Contohnya *friendster*, *yahoo*.
5. Kemudahan, usahakanlah supaya para pengunjung situs *web* tidak mengalami kesulitan dalam menjelajah isi situs *web*.
6. *Link* yang berguna, link merupakan hal yang sangat penting perannya dalam sebuah situs *web* karena merekalah yang mengantarkan pengunjung situs *web* untuk melihat-lihat dari situs *web* tersebut. Dengan *link* orang dapat lebih mudah mengakses apa yang dicari dan dibutuhkannya.

7. *Up to date*, selalu perbaharui isi situs *web* tersebut. Pengunjung situs *web* tersebut akan bosan apabila isi situs *web* tersebut tidak mengalami perubahan. Sesuatu yang lebih baru akan senantiasa menarik minat pengunjung situs web untuk senantiasa mengaksesnya.
8. Kuasai *software* lain, tidak ada *software* yang benar-benar sempurna, oleh karena itu kuasailah *software* untuk animasi atau *photoshop*. Hal tersebut akan sangat membantu mepercantik tampilan halaman situs *web* tersebut. Lebih banyak program *software* yang dikuasai dan digunakan, maka tampilan situs *web* akan lebih menarik

(Firmansyah, 2002:5-8).

Seiring dengan kemanjuan teknologi, segala pekerjaan menjadi mudah dengan adanya internet. Internet menjadi sebuat sistem atau alat yng mulai banyak digunakan oleh masyarakat karena dapat mempermudah dalam pencarian data atau informasi.

2.3.2 Cara-Cara untuk Menghubungkan ke *Internet*

Menurut Jugianto Hartono terdapat beberapa cara untuk menghubungkan ke *internet,* yaitu:

1) Menghubungkan ke *internet* lewat jasa *internet* (*Internet service provider*)
2) Menghubungkan ke *internet* lewat penyedia jasa informasi
3) Menghubungkan ke *internet* secara langsung.

(Hartono, 1999: 342)

Untuk dapat menggunakan *internet*, pengguna *internet* dapat mengakses komputer pada perusahaan yang telah terkoneksi ke *internet* atau menjadi pelanggan dari sebuah *Internet Service Provider (*ISP). ISP merupakan organisasi komersial yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa akses ke *internet*. Penyedia jasa informasi dan menghubungkan secara langsung dengan membuat jaringan *Local Area Network* (LAN), adalah merupakan cara yang paling mudah untuk menguhubungkan ke *internet*.

2.4 *Website*

2.4.1 Pengertian *Website*

Perkembangan *internet* yang sangat cepat telah membentuk suatu komunitas pengguna *internet* yaitu *world wide web* (www) atau *website*. Pengertian *website* menurut Jack Febrian adalah:

> "Sebuah lokasi di *internet* yang memiliki akses ke semua pengguna *internet* dan dapat saling bertukar dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain dalam suatu jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi seperti kabel telepon" (Febrian, 2001:180).

Website merupakan alamat di *internet* yang memudahkan pengguna *internet* untuk memenuhi kebutuhan informasi, melalui *website* pengguna *internet* dapat dengan mudah mencari informasi sesuai dengan kebutuhan. Hal senada juga dikemukakan Mico Pardosi, *Website* adalah dokumen dalam *internet* (lebih tepatnya URL atau alamat *internet*) biasa disebut juga *web* atau *homepage* (Pardosi, 2004:2). Penggunaan *website* menjadi suatu hal yang penting, baik bagi individu, organisasi dan pemerintahan. *Website* merupakan alamat di *internet* yang dapat di akses oleh siapa saja bagi mereka yang mengetahui alamat tersebut dengan menggunakan *browser*. *Website* berisikan data-data, informasi dan gambar.

2.4.2 Fungsi *Website*

Sistem pengaksesan informasi dalam *internet* yang paling terkenal adalah *website. Website* berkembang menjadi fasilitas untuk menampilkan *browser* elektronik dan menyebabkan meningkatnya penggunaan *intranet, ekstranet* juga *internet*. Adapun fungsi *website* adalah:

1) Memperlebar Ruang Promosi
2) Mempermudah Komunikasi
3) Berinteraksi.

(Safri, Lubis Muhamad Melalui http//www.cert.or.id/muhammad/articels/e-gov-serdang [2007/06/03].)

Website tidak sekedar hanya menyajikan informasi, akan tetapi *website* di dapat memperluas jaringan promosi, saling berkomunikasi melalui *e-mail* ataupun informasi kontak yang ada pada *website*. Sehingga memudahkan untuk saling berkomunikasi walaupun perbedaan lokasi yang teramat jauh dan komunikasi yang dilakukan sangat efesien waktu.

Interaksi yang dapat dilakukan dalam *website* diantaranya adalah transaksi jual-beli, forum diskusi, *upload atau download file* dan lain sebagainya. Pembentukan *website* pada intansi pemerintahan dapat berfungsi menjadi sebuah pusat pelayanan dimana masyarakat dapat melakukan segala sesuatunya melalui *websit*e mulai dari pendaftaran, aktifitas kependudukan, mengikuti berbagai survei, pembayaran *online* atas segala pajak dan retribusi.

2.4.3 Elemen-Elemen yang Harus Dimiliki Sebuah *Website*

Website dapat dikatakan baik, apabila sebuah *website* memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1) Sistem pengorganisasian *content* atau isi *website* haruslah memiliki aristektur yang jelas dan terstruktur secara logis
2) Navigasi yang diterapkan dalam *website* haruslah mudah cara pengoperasiannya
3) Isinya harus *up-to-date* dalam arti kata selalu diperbaharui sehingga relevan dengan kebutuhan
4) Waktu untuk menampilkan satu halaman penuh *website* haruslah cepat (disarankan tidak lebih dari 10 detik), sehingga perlu dipertimbangkan ukuran memori total dari sebuah desain *website*
5) Tampilan *website* haruslah menarik dalam arti kata memiliki desain grafis yang sesuai dengan karakteristiknya *audience* nya
6) *Website* haruslah dapat dinikmati oleh semua orang, terlepas dari faktor perbedaan usia, agama, bahasa, maupun hal-hal lain yang terdapat di dalam masyarakat
7) Unsur privasi harus pula diperhatikan dalam arti kata para penggunaan *website* merasa yakin bahwa tidak hal-hal yang akan merugikan dirinya terkait dengan isu keamanan berinteraksi secara digital ketika mengakses *website*

(Indrajit, 2005:56).

Website merupakan sebuah media untuk kebutuhan pelayanan. Pembuat *website* harus mengetahui dan memperhatikan kebutuhan pengguna *website.* supaya menarik minat pengguna *website* untuk selalu mengakses, pada dasarnya adalah tampilan *website* harus terstruktur secara logis, mudah dalam pengoperasian, informasi yang diberikan merupakan informasi terbaru, *loding* yang tidak terlalu lama, desain grafis dari tampilan *website* harus sesuai dengan karaktristik pengguna *website*, dapat dinikmati oleh semua orang dan keamanan bagi penggunanya.

2.4.4 Tipe Relasi *e-Government*

Modernisasi teknologi pada pemerintahan menjadikan pemerintahan yang berbasis teknologi digital, manfaat teknologi digital pada pemerintahan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemerintah dalam penyelenggaran

pelayanan terhadap masyarakat. Istilah teknologi digital pada pemerintahan selanjutnya di sebut *e-Government*. The World Bank Group mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut:

> "*e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citezens, business, and other arms of government"* (*e-Government* dijadikan acuan yang digunakan dalam sistem teknologi informasi pemerintahan seperti dalam *wide area networks, internet* dan komunikasi berjalan, yang memiliki kemampuan untuk menjembatani hubungan dengan warga negaranya, para pebisnis dan elemen lainnya). (Budi Rahardjo, 2001:http://www.cert.or.id/budi/articles/e-gov-makassar [2010/03/04].).

Pada intinya *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2G (*Inter-agency relation ship*) merupakan interaksi antar pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, G2C (*Government to Citizen*) merupakan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses, G2B (*Government to Business*) merupakan interaksi antara pemerintah dengan para pelaku usaha (perusahaan) dengan tujuan untuk membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan dengan baik.

Konsep *e-Government* apabila diklasifikasikan menurut Richardurs Eko Indrajit dibagi kedalam empat jenis, yaitu:

1) *Government to Citizens* (G-to-C), tujuannya adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.
2) *Government to Business* (G-to-B), merupakan bentuk relasi antara pemerintah dengan para pengusaha, dengan tujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya.
3) *Government to Government* (G-to-G), merupakan interaksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya dengan tujuan untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik dan mekanisme hubungan sosial dan budaya.
4) *Government to Employes* (G-to-E), tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

(Indrajit, 2004:42).

Klasifikasi jenis-jenis *e-Government* di atas adalah yang menjadi dasar bahwa implementasi *e-Government* sangat penting. Jenis-jenis tersebut menggambarkan suatu interaksi, pemerintah sebagai unsur penyelenggara roda pemerintahan sangat membutuhkan akan hubungan dengan masyarakat untuk kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan publik, hubungan dengan para pengusaha karena melalui hubungan tersebut pemerintah mengharapkan akan terciptanya sistem perekonomian yang baik, hubungan antar instansi pemerintahan untuk kepentingan pemenuhan data dan implementasi G-to-E adalah untuk peningkatan kinerja dan memberikan kemudahan kepada aparatur dalam melayani masyarakat.

2.5 *E-Procurement*

2.5.1 Pengertian *E-Procurement*

E-procurement didunia pemerintahan telah menunjukkan bahwa pemerintah pun bisa mempergunakan teknologi informasi sebagai bagian dari pelayanannya. eko indrajit dalam bukunya yang berjudul ***E-Government in Action*** yang dimaksud dengan *e-procurement* adalah:

> "*e-procurement* merupakan suatu mekanisme pembelian masa kini atau dapat dikatakan sebagai teknik pembelian modern dengan memanfaatkan sejumlah aplikasi berbasis internet dan perangkat teknologi informasi terkait lainnya sebagai enabler dalam menjalankan proses tersebut. Sedangkan sistem *e-procurement* merupakan kumpulan dan sejumlah komponen-komponen atau entitas-entitas didalam perusahaan yang saling terkait satu dengan lainnya, yang memiliki fungsi untuk menjalankan konsep *e-procurement* didalam perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan komponen terkait misalnya : perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*) dan pemakai atau pengguna (*users*), kebijakan (*policy*), tata kelola (*governance*), proses (*business process*), dan infrastruktur perusahaan" (indrajit, 2005: 45).

Melihat dari definisi yang telah diuraikan tersebut, maka *e-procurement* dapat dipahami sebagai suatu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan media elektronik (mencakup teknologi informasi dan telekomunikasi) yang berbasis internet disertai dengan komponen-komponen lain yang terikat didalamnya. Adapun yang dimaksud dengan komponen-komponen lain yang terikat didalamnya tersebut dapat berupa perangkat-perangkat teknologi informasi, sumber daya manusia, prosedur, tata kelola dan juga kebijakan pendukung.

Pengertian *e-procurement* lain menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (*Australian Government Information Management*,

AGIMO): *e-procurement* adalah pembelian antar-bisnis *(business-to-business*, B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet. (www.agimo.gov.au/publications/2001/11/ar00-01/glossary). *E-procurement* merupakan sarana pembelian dan penjualan suatu barang maupun jasa antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan melalui internet.

Davila, Tony, Mahendra Gupta, dan Richard Palmer dalam jurnal "*Moving Procurement Systems to The Internet*" menyebutkan *e-procurement*:

> "*E-procurement* adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet. *E-procurement* adalah manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik yang didalamnya terdapat aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik" (2003).

E-procurement merupakan teknologi yang dibuat untuk memberikan kemudahan dalam suatu kegiatan pelelangan barang dan jasa yan didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

2.5.2 Manfaat *E-Procurement*

E-Procurement dalam implementasinya mampu mendukung interoperabilitas dan jaminan keaman data (*security*), dimana dalam prosesnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga proses akan sangat terbuka, yang pada gilirannya persaingan sehat yang adil dan non-diskriminatif antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong, sehingga efisiensi dan efektifitas belanja negara dapat terwujud.

Internet telah muncul sebagai media yang efektif dari segi biaya dan dapat diandalkan untuk melakukan transaksi bisnis *online*. Semakin banyak perusahaan

yang mengadopsi media ini dalam melakukan pengadaan barang mereka. Menurut Seth Miller dalam artikelnya (http://EzineArticles.com/?expert=Seth_Miller) keuntungan utama *e-procurement* meliputi menghemat uang, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis. Proses pengadaan konvensional biasanya melibatkan banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan sejumlah besar waktu dan uang. Dalam beberapa contoh, biaya pemrosesan berkurang sebesar 85%.

Dalam *paper e-procurement* Benefits (http://emarketplace.lgaq.asn.au/lgaq /resources/e-Marketplace/e-procurement%20Benefits.doc) disebutkan beberapa manfaat *e-procurement* yang meliputi pertama, penghapusan biaya administrasi. Penerapan *e-procurement* mengotomatisasi banyak proses administrasi dalam pembelian sehingga menjadi proses yang tanpa tertulis (*paperless*). Pengadaan secara tradisional dipandang sebagai pekerjaan penyampaian kertas dalam seluruh perusahaan. Mengalihkan beban adminstrasi bagi staf dan mengotomatiskan pekerjaan kunci menghemat waktu mereka dan lebih lanjut menghemat dana.

Kedua, pemotongan biaya pembelian. *E-procurement* tidak secara intrinsik mengurangi biaya pembelian, tetapi mendorong suatu organisasi atau institusi pemerintah untuk mencapai tujuan ini dengan cara mengenalkan sebuah sistem yang dapat digunakan dengan mudah oleh orang-orang. Setiap orang di suatu organisasi atau institusi pemerintah menyesuaikan dengan aturan yang dipilih dan oleh karena itu meningkatkan kemampuan membeli terhadap *supplier* yang dipilih. Ketika bertransaksi secara elektronik, akan lebih sering memberikan diskon karena biaya administrasi mereka lebih rendah. Bertransaksi secara

elektronik akan mengurangi pembelian yang tidak terawasi oleh panitia lelang. Rekanan dapat lebih berkomitmen terhadap perjanjian-perjanjiannya karena lebih terjamin untuk memperoleh bagian yang lebih besar dari pengeluaran panitia lelang.

Ketiga, pemotongan waktu siklus pembelian. Waktu dari pemesanan hingga pengiriman dapat berhari-hari atau berbulan-bulan, membuat proses pengadaan menjadi kurang layak untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus dipesan secara cepat. Penundaan-penundaan sering disebabkan oleh persyaratan-persyaratan tertulis yang harus ditangani secara manual oleh satu atau lebih orang dan di mana anggaran dan komitmen-komitmen harus diperiksa sebelum pesanan keluar.

Solusi *e-procurement* dengan tingkat kemajuan pekerjaan menjadi sifat inti mengefisienkan proses ini dan menghindari kemacetan (*bottleneck*) yang umum terjadi dalam proses ini. Hal ini memungkinkan suatu permintaan diperiksa secara otomatis terhadap *setting-setting* yang sudah ditetapkan dan disetujui secara elektronik. *E-procurement* mendorong panitia lelang untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat tanpa mengorbankan kendali. Manfaat bagi panitia lelang dari segi pengurangan waktu siklus pembelian karena akan terjadi peningkatan efisiensi, keluar dari sistem yang ada.

Keempat, kontrol manajemen yang lebih besar karena semua data pengadaan diproses melalui satu *database* terpusat dan secara otomatis diintegrasikan ke dalam *Financial Management Information System* (FMIS). *E-procurement* memungkinkan analisis yang relevan dan laporan manajemen dapat

dengan mudah dihasilkan. *E-procurement* bertujuan mengurangi beban administratif yang berarti bahwa mereka dapat memfokuskan pada pengambilan keputusan yang lebih proaktif.

Kelima, sesuai kebutuhan user (*user compliance*). Ketika masih menggunakan sistem tradisional, mereka kadang harus melakukan panggilan telepon kepada pemberi wewenang yang berbeda-beda atau kepada rekanan untuk mempercepat transaksi. *E-procurement* menyediakan pengguna suatu cara mengadakan barang yang umumnya lebih cepat bahkan daripada metode yang bebas. Mereka dapat dengan cepat menyelesaikan pesanan pada layar dengan *interface* yang *user-friendly*. Mereka dapat melacak perkembangan pesanan mereka pada tahap manapun dari rantai persetujuan dan dapat diinformasikan secara elektonik untuk pengiriman barang dari pemasok.

Keenam, pengurangan tingkat kesalahan pemesanan. *E-procurement* secara dramatis mengurangi kecenderungan kesalahan pengguna dalam proses pengadaan, karena pesanan-pesanan dibuat dengan memilih item-item yang ada di katalog dalam sistem.

Ketujuh, pekerja pengetahuan (*knowledge workers*), menggambarkan bagaimana staf tidak lagi terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan administratif seperti mengisi dan menyampaikan form-form, karena semuanya dikomputerisasi dan staf-staf diberi informasi untuk me-*manage* pengadaan, daripada di-*manage* olehnya. Mengubah staf menjadi *knowledge workers* menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Hal ini berlaku bagi seluruh orang yang terlibat dalam proses

pengadaan yaitu penyusun pesanan, pemberi wewenang, manajer, staf keuangan, dan lain-lain.

Sistem sisi penjualan memungkinkan penjual berinteraksi dengan banyak *customer* sekaligus, organisasi *customer* mungkin harus mengintegrasikan sistem mereka dengan banyak solusi tergantung jumlah rekanan. Keuntungan menggunakan solusi ini, dibandingkan dengan yang tradisional bagi sebuah organisasi *customer* yaitu dalam hal peningkatan nilai *customer* melalui manajemen biaya atau waktu yang efisien dan kemampuan akses yang mudah.

Sistem *end-user* pembelian berinteraksi dengan sistem informasi internal seperti *Enterprise Resource Planning* (ERP) memungkinkan sistem mengotomatisasi sebagian transaksi, sehingga meningkatkan kecepatan penanganan transaksi serta mengurangi biaya pemrosesan. Suatu institusi pemerintah maupun suatu organisasi dapat meniadakan katalog tercetak melalui *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *e-mail*. Manajemen inventori menjadi lebih mudah melalui peringatan dan *update* otomatis, secara simultan memungkinkan pembeli memberitahu secara otomatis untuk pembayaran pasangan yang diperbarui. Me-*manage* akun-akun yang diterima juga menjadi lebih ringkas bagi mereka.

2.6 Jenis-jenis LPSE

Pelaksanaan *e-Procurement* pemohon terdiri dari 2 (dua) jenis LPSE, yaitu pertama, LPSE Sistem *Provider*. Pada LPSE Sistem Provider ini memiliki organisasi sebagaimana tersebut pada huruf b, dan mempunyai, mengelola dan

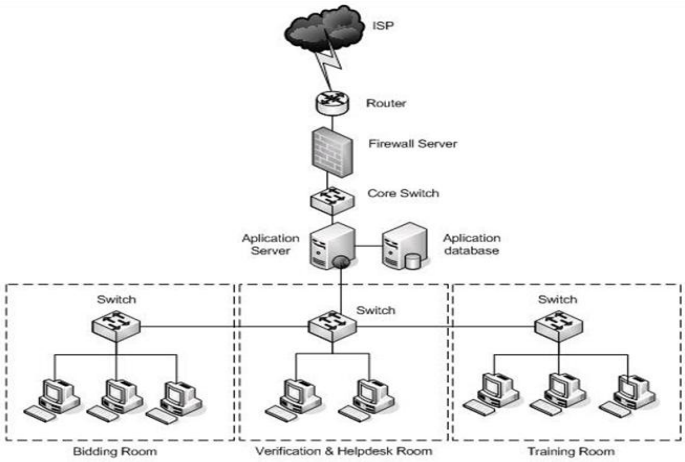
memelihara perangkat keras yang tidak terbatas pada perangkat jaringan dan *server* yang telah terinstalasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun selain fungsi diatas yang merupakan tugas dari Bidang Administrasi Sistem Informasi, LPSE dengan tipe ini juga melaksanakan fungsi lainnya, misal:

1) Sosialisasi kepada PPK atau Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang dan Jasa,
2) Pelatihan kepada PPK atau Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang dan Jasa,
3) Melayani PPK atau Panitia Pengadaan untuk mendapatkan kode akses, dan
4) Melakukan verifikasi terhadap dokumen (Akta, SIUP, TDP, ijin usaha sesuai bidang, KTP Pemilik dan atau Direktur Perusahaan, dll.) penyedia barang atau jasa yang sebelumnya telah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan kode akses secara *online*; dan fungsi-fungsi lainnya.

Dengan LPSE ini maka suatu instansi pemerintah akan memiliki alamat *website* sendiri, contohnya adalah instansi pemerintah berasal dari Pemkot Tulungagung maka alamat *website* adalah www.lpse.kotatulungangung.go.id.

Gambar 2.1

LPSE Sistem *Provider*

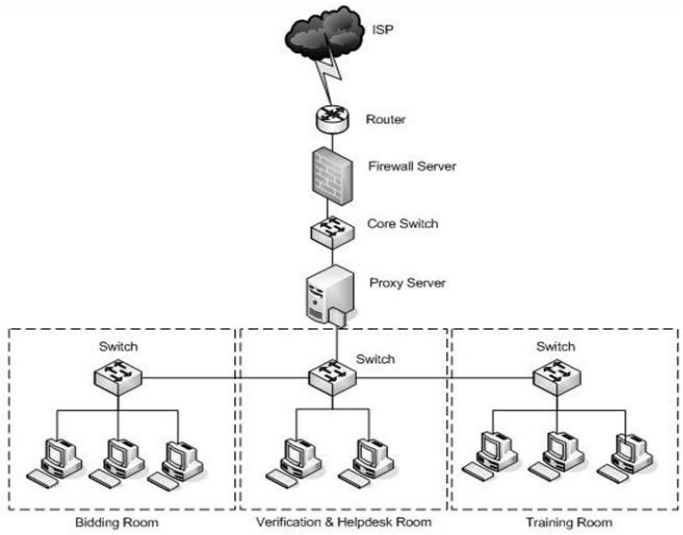


Sumber : www.lkpp.go.id Tahun 2008

Kedua, LPSE *Service Provider*. Pada LPSE *Service Provider* ini fungsi mengelola server yang telah terinstalasi LPSE tidak diperlukan karena LPSE tipe ini akan menginduk pada LPSE terdekat sehingga tidak memiliki alamat *website* sendiri namun tetap menjalankan fungsi lainnya, contohnya instansi pemerintah yang berasal dari Pemkot Tasikmalaya dengan alamat website www.lpse.jabarprov.go.id (alamat ini milik LPSE Provinsi Jawa Barat).

Gambar 2.2

LPSE *Service Provider*



Sumber : www.lkpp.go.id Tahun 2008

Pelaksanaan pelelangan secara elektronik telah memberikan perkembangan dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat. Layanan pengadaan secara elektronik yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat telah membantu sistem pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. LPSE Provinsi Jawa Barat menjadi sistem provider dan service Provider, LPSE Provinsi Jawa Barat dapat melayani pelaksanaan pelelangan barang dan jasa dari kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat.